



Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Mitigasi Risiko Fraud : Studi Kasus Proyek Waingapu

Aqila Rachmawati¹, Fajar Syaiful Akbar^{2*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email: 122013010059@student.upnjatim.ac.id, 2*fajarsa.ak@upnjatim.ac.id
(* : coressponding author)

Abstrak

Fraud dalam proyek konstruksi merupakan salah satu risiko serius yang dapat mengganggu efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek. Sistem pengendalian internal menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya fraud, khususnya pada tahapan pengadaan dan penggunaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh PT. Bangun Mitra Persada dalam pelaksanaan Proyek Waingapu serta menilai efektivitasnya dalam mencegah praktik fraud. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur kepada satu narasumber internal perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal diterapkan secara ketat melalui pengawasan langsung oleh pemilik perusahaan terhadap setiap pengeluaran, baik besar maupun kecil. Setiap pembelian harus mendapat persetujuan langsung dari pimpinan dan mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, pemahaman karyawan terhadap harga pasar serta hubungan yang baik dengan vendor turut membantu menjaga efisiensi dan mengurangi risiko kecurangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan langsung pimpinan, kepatuhan terhadap RAB, serta pengendalian dokumen menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya fraud di lapangan.

Kata Kunci: Fraud, Pengendalian Internal, Proyek Konstruksi, Mitigasi Risiko.

Abstract

Fraud in construction projects is a serious risk that can undermine the efficiency and accountability of project implementation. Internal control systems play a crucial role in preventing fraud, particularly in procurement and budget utilization processes. This study aims to evaluate the internal control system implemented by PT. Bangun Mitra Persada in the execution of the Waingapu Project and to assess its effectiveness in preventing fraudulent practices. This research adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through semi-structured interviews with one internal company informant. The results show that the internal control system is implemented strictly through direct supervision by the company owner over all project expenditures, regardless of their scale. Each transaction must receive direct approval from management and must refer to the pre-established Budget Plan (RAB). In addition, employees' understanding of market prices and their close relationships with vendors contribute to maintaining cost efficiency and reducing fraud risks. These findings indicate that direct leadership involvement, compliance with budget planning documents, and strict documentation control are key factors in effectively preventing fraud within project operations.

Keywords: Fraud, Internal Control, Construction Project, Risk Mitigation.

1. PENDAHULUAN

Pengendalian internal merupakan bagian integral dari sistem organisasi yang dirancang untuk memberikan tingkat keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan, terutama terkait efisiensi dan efektivitas operasional, keakuratan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks proyek, sistem ini memiliki peran krusial karena setiap fase mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi akhir mengandung berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan penyimpangan atau tindakan kecurangan (fraud), terutama dalam pengelolaan dana dan implementasi teknis di lapangan [1]. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan konsisten sangat diperlukan agar seluruh proses proyek dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, efisien, dan bertanggung jawab. Pengawasan internal yang kuat tidak hanya memastikan kepatuhan prosedur, tetapi juga memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, khususnya ketika proyek melibatkan dana dari pemerintah atau pihak eksternal. Dengan demikian, pengendalian internal berperan tidak hanya sebagai sistem perlindungan, melainkan juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Lebih lanjut, keberadaan sistem pengendalian internal juga memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pencegahan fraud, karena persepsi positif karyawan terhadap sistem ini berkontribusi signifikan dalam mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan di lingkungan perusahaan [2]. Masih banyak perusahaan konstruksi di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam menerapkan sistem pengendalian internal yang optimal. Faktor-faktor seperti struktur organisasi yang belum tertata, lemahnya sistem dokumentasi dan pencatatan, serta minimnya pengawasan dari pimpinan perusahaan menjadi penyebab utama rentannya celah *fraud* dalam proyek. *Fraud* yang terjadi pun tidak selalu dalam bentuk besar dan kasat mata, melainkan bisa berupa manipulasi harga, pembengkakan anggaran, penggunaan material tidak sesuai spesifikasi, hingga kolusi dalam pengadaan barang. Jika tidak ditanggulangi



dengan sistem pengawasan yang kuat, praktik *fraud* tersebut dapat berkembang menjadi budaya organisasi yang merusak integritas perusahaan dalam jangka panjang [3]. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pengendalian internal mereka, khususnya dalam proyek-proyek strategis. Evaluasi ini penting agar dapat diketahui apakah pengendalian yang diterapkan sudah mampu mengidentifikasi risiko secara dini, serta mampu meresponsnya secara tepat.

Dalam dunia konstruksi, proyek-proyek berskala besar sering kali melibatkan proses keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi terhadap penyimpangan. Oleh sebab itu, keberadaan sistem pengendalian internal yang kuat menjadi syarat mutlak agar seluruh tahapan pelaksanaan proyek dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel. Salah satu aspek penting dari pengendalian internal adalah adanya pemisahan fungsi, otorisasi yang jelas, dan pengawasan berjenjang terhadap setiap aktivitas pengadaan maupun penggunaan anggaran [4]. Tidak hanya itu, keterlibatan manajemen puncak dalam proses pengambilan keputusan strategis juga menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan menekan potensi *fraud*. Perusahaan konstruksi dituntut untuk tidak hanya memiliki prosedur administratif yang baik, tetapi juga memastikan bahwa implementasi di lapangan benar-benar sesuai dengan kebijakan internal. Penelitian [5] menunjukkan dari bahwa sistem pengendalian internal yang efektif, terutama pada perusahaan konstruksi di Surabaya, mampu menekan faktor penyebab utama terjadinya *fraud*, seperti lemahnya kontrol dan penyalahgunaan wewenang. Evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa mekanisme yang telah dirancang tidak hanya bersifat formalitas, melainkan benar-benar mampu mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan [6]. Studi lebih mendalam mengenai pelaksanaan pengendalian internal dalam proyek konstruksi tertentu menjadi penting untuk memberikan gambaran empirik serta sebagai pembelajaran bagi entitas bisnis sejenis dalam merancang dan menerapkan kontrol internal yang lebih optimal.

Penelitian ini penting karena *fraud* dalam proyek konstruksi merupakan salah satu masalah krusial yang dapat merugikan perusahaan secara signifikan, baik dari sisi finansial, reputasi, maupun keberlanjutan proyek. Di tengah tingginya kompleksitas pengadaan dan dinamika harga pasar, pengawasan internal yang lemah membuka peluang besar bagi kecurangan, seperti *mark-up* harga, manipulasi laporan keuangan, atau pembelian fiktif. Sistem pengendalian internal harus tidak hanya dirancang, tetapi juga dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah *fraud* sejak dini. Penelitian ini diperlukan untuk memberikan gambaran konkret tentang bagaimana kontrol internal diterapkan dalam konteks nyata proyek konstruksi, serta bagaimana mekanismenya mampu membatasi ruang gerak penyimpangan. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkuat praktik tata kelola perusahaan melalui sistem pengendalian internal yang lebih efektif dan terukur.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh PT. Bangun Mitra Persada berperan dalam mencegah terjadinya *fraud* pada pelaksanaan Proyek Waingapu. Permasalahan ini menjadi penting karena dalam setiap proyek konstruksi, terutama proyek yang melibatkan anggaran besar dan proses pengadaan yang berlapis, potensi terjadinya *fraud* cenderung tinggi. *Fraud* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti manipulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB), penggelembungan harga material, pemalsuan dokumen pembelian, atau kerja sama tidak sah antara pihak internal dan *vendor*. Oleh sebab itu, fokus penelitian diarahkan pada bagaimana bentuk, strategi, dan mekanisme pengendalian internal yang dijalankan oleh perusahaan dalam menekan atau bahkan mencegah potensi penyimpangan tersebut. Penelitian ini juga menyoroti sejauh mana pelaksanaan pengawasan internal diintegrasikan ke dalam kegiatan operasional proyek secara nyata, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, pengendalian transaksi, serta pelaporan keuangan proyek. Fokus permasalahan ini menggambarkan upaya untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal pada pelaksanaan proyek konstruksi yang memiliki tantangan dan risiko tinggi terhadap terjadinya *fraud*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan komponen pengendalian internal yang digunakan, termasuk prosedur, kebijakan, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan dalam setiap tahapan proyek. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana sistem tersebut berjalan secara efektif dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan, baik dari sisi keuangan maupun operasional. Evaluasi dilakukan dengan menggali informasi langsung dari pelaksana proyek, sehingga diperoleh gambaran nyata mengenai praktik pengendalian yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian dapat menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi yang aplikatif dalam rangka memperkuat sistem pengawasan internal perusahaan, baik untuk proyek yang sedang berjalan maupun untuk pelaksanaan proyek-proyek berikutnya. Tujuan penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga konstruktif dalam memberikan masukan yang berorientasi pada peningkatan integritas dan efisiensi tata kelola proyek konstruksi.

2. METODE PENELITIAN



2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif sebagai dasar analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam berbagai aspek terkait sistem pengendalian internal serta kontribusinya dalam mencegah tindakan fraud pada proyek konstruksi. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menyajikan pemahaman yang sistematis dan rinci mengenai kondisi aktual di lapangan, berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari informan [7]. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi, melainkan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait implementasi sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan Proyek Waingapu oleh PT. Bangun Mitra Persada. Fokus utama penelitian mencakup elemen-elemen seperti mekanisme pengawasan, proses pembelanjaan dan pengadaan, pelaksanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta peran aktif pimpinan dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap proyek yang sedang berlangsung.

2.2 Teknik Analisis

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber utama yang merupakan pihak internal dari PT. Bangun Mitra Persada. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi informasi lebih dalam, namun tetap terarah pada topik yang telah ditentukan. Narasumber dipilih secara *purposive*, yaitu individu yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan proyek dan memahami secara menyeluruh bagaimana sistem pengendalian internal dijalankan dalam praktik sehari-hari. Analisis data dilakukan secara tematik dengan cara mengidentifikasi pola-pola dan kategori temuan berdasarkan tema besar penelitian, yakni efektivitas pengendalian internal dalam pencegahan *fraud*.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber internal dari PT. Bangun Mitra Persada, ditemukan beberapa hal, yaitu:

1. Sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan Proyek Waingapu telah berjalan secara langsung dan terstruktur. Pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan dan pembelanjaan proyek dilakukan oleh pemilik perusahaan sendiri, tanpa adanya pelimpahan wewenang penuh kepada staf atau pihak ketiga. Setiap aktivitas pembelian, baik dalam skala besar maupun kecil, wajib mendapatkan persetujuan langsung dari pemilik sebelum dieksekusi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pengeluaran sesuai dengan kebutuhan riil proyek dan tidak melampaui batas anggaran yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Mekanisme kontrol ini diterapkan secara konsisten sejak awal proyek hingga tahap pelaporan akhir.
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada proyek ini dilakukan dengan prinsip efisiensi dan kewajaran harga. Karyawan yang bertugas dalam proses pembelian memiliki pemahaman yang baik terhadap harga pasar, bahkan sering kali bertransaksi dengan jaringan rekanan atau kenalan pribadi yang memberikan potongan harga khusus. Kondisi ini membantu perusahaan mendapatkan nilai terbaik dari setiap transaksi sekaligus meminimalisasi potensi pembengkakan biaya yang tidak wajar. Praktik ini juga menunjukkan adanya peran informal dari jejaring sosial dalam menjaga efisiensi anggaran proyek. Seluruh kebutuhan pengadaan yang disetujui pun harus tertuang secara jelas dalam kontrak dan dokumen tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.
3. Perusahaan menjadikan RAB sebagai dokumen acuan utama dalam seluruh pengeluaran proyek. Selama pelaksanaan proyek, penyimpangan dari RAB berusaha dihindari semaksimal mungkin. Kalaupun terjadi penyesuaian harga akibat fluktuasi pasar, perusahaan tetap berupaya menjaga agar perbedaan tersebut tidak signifikan dan tetap berada dalam batas toleransi kewajaran. Menurut narasumber, *fraud* dalam proyek seperti ini sangat jarang terjadi karena sistem pengendalian yang diterapkan sangat ketat. Bahkan untuk proyek-proyek yang berasal dari dana pemerintah, pengawasan dilakukan secara ekstra untuk memastikan tidak ada celah penyimpangan.

3.2 Pembahasan

Hasil wawancara terlihat bahwa struktur pengendalian telah mencakup tahap perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, hingga verifikasi pembelanjaan. Namun demikian, implementasinya masih menemui hambatan yang dapat berdampak pada kelancaran deteksi dini kecurangan, seperti keterlambatan proses verifikasi dan minimnya audit berbasis risiko. Hal ini menandakan adanya gap antara rancangan prosedur tertulis dengan praktik aktual di lapangan, sehingga evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk menjembatani keduanya.



Salah satu poin penting dari hasil wawancara adalah identifikasi titik-titik rawan kecurangan. Narasumber menegaskan bahwa tahap pengadaan dan persetujuan pembelanjaan menjadi bagian paling rentan, di mana potensi *mark-up* harga, pemesanan barang di bawah spesifikasi, atau bahkan pengadaan fiktif dapat terjadi. Keberadaan prosedur identifikasi ini memang membantu mempersempit ruang kecurangan, tetapi efektivitasnya bergantung pada seberapa sering dan seberapa detail pengawasan dilakukan. Jika hanya mengandalkan pemeriksaan akhir tanpa pengawasan berkala, risiko terjadinya fraud tetap tinggi. Mekanisme verifikasi dan otorisasi pembelanjaan menjadi aspek berikutnya yang mendapatkan sorotan. Berdasarkan keterangan narasumber, proses verifikasi saat ini masih dilakukan secara manual dengan memerlukan tanda tangan fisik dari pimpinan. Sistem ini memang meningkatkan akuntabilitas karena setiap transaksi besar harus melewati persetujuan pejabat yang berwenang. Namun, metode manual ini rentan mengakibatkan keterlambatan, terlebih jika pimpinan memiliki jadwal yang padat atau berada di luar lokasi proyek. Digitalisasi proses verifikasi melalui platform *e-approval* akan membantu mempercepat proses, mengurangi risiko dokumen hilang, dan menciptakan jejak audit yang lebih transparan.

Dalam hal analisis risiko fraud pada pengadaan, narasumber mengungkapkan bahwa pemilihan vendor selama ini mengandalkan rekomendasi internal dan rekam jejak kinerja. Strategi ini dinilai praktis, tetapi kurang menjamin objektivitas. Keterikatan personal atau hubungan jangka panjang dengan vendor tertentu berpotensi memunculkan kolusi dan konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat untuk memilih mitra kerja yang terpercaya, mekanisme yang digunakan belum sepenuhnya meminimalkan risiko penyimpangan. Peran pimpinan menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem pengendalian internal. Narasumber menjelaskan bahwa pimpinan memiliki keterlibatan yang signifikan dalam memberikan persetujuan atas pengeluaran besar. Namun, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan monitoring yang konsisten pada proses harian di lapangan. Keterlibatan aktif tidak hanya pada persetujuan, tetapi juga pada evaluasi rutin terhadap proses pengadaan dan pembelanjaan akan meningkatkan akuntabilitas, menutup celah kecurangan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan proyek.

Aspek Pengendalian Internal	Hasil Wawancara	Analisis Peneliti	Rekomendasi
Identifikasi titik rawan kecurangan	Tahap pengadaan dan persetujuan pembelanjaan dianggap paling rawan terjadinya penyimpangan seperti <i>mark-up</i> harga atau barang/jasa tidak sesuai spesifikasi.	Area ini memiliki risiko tinggi terjadinya kecurangan karena nilai transaksi yang besar dan sulitnya memverifikasi kualitas secara langsung.	Lakukan pengawasan fisik secara acak, audit dokumen pembelian, dan pemisahan fungsi antara pihak pengadaan dan verifikasi.
Mekanisme verifikasi & otorisasi	Proses verifikasi dilakukan manual dan membutuhkan tanda tangan fisik pimpinan	Proses ini meningkatkan akuntabilitas, namun rentan menimbulkan keterlambatan dan mengurangi respons cepat terhadap potensi masalah.	Terapkan <i>e-approval system</i> untuk mempercepat proses, mengurangi risiko dokumen hilang, dan menyediakan jejak audit digital.
Analisis risiko pengadaan	Pemilihan vendor lebih sering berdasarkan rekomendasi internal dan rekam jejak kinerja sebelumnya.	Praktik ini cepat dilakukan tetapi rawan kolusi dan konflik kepentingan.	Terapkan sistem tender terbuka, lakukan pembandingan harga pasar, dan evaluasi kinerja vendor secara periodik.
Peran pimpinan	Pimpinan terlibat dalam persetujuan pengeluaran besar tetapi tidak selalu memantau proses di lapangan.	Peran strategis sudah baik, namun kurangnya keterlibatan di tahap operasional menimbulkan celah pengawasan.	Lakukan monitoring langsung oleh pimpinan atau perwakilannya secara berkala, terutama pada tahapan kritis.
Kekuatan & kelemahan pengendalian	Kekuatan: kepatuhan pada RAB, dokumentasi cukup rapi. Kelemahan: minim audit berbasis risiko.	Kelemahan ini dapat mengurangi efektivitas pengendalian jangka panjang.	Tingkatkan kapasitas tim audit internal dan terapkan audit berbasis risiko secara terjadwal.



Tabel tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual pengendalian internal yang diidentifikasi melalui hasil wawancara. Terlihat bahwa sebagian besar temuan berkaitan dengan aspek prosedural yang sebenarnya sudah terbangun dengan baik, seperti kepatuhan pada RAB dan dokumentasi yang rapi. Namun, di sisi lain, kelemahan-kelemahan yang terungkap menunjukkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk terjadinya kecurangan, terutama pada tahap pengadaan, verifikasi, dan pemilihan vendor. Misalnya, proses verifikasi manual yang membutuhkan tanda tangan fisik pimpinan memang meningkatkan legitimasi dokumen, tetapi berpotensi memperlambat proses deteksi masalah. Keterlambatan ini bisa berakibat serius jika penyimpangan baru diketahui setelah tahapan pembayaran selesai, sehingga kerugian tidak lagi dapat dihindari.

Selain itu, keterkaitan antara beberapa aspek juga terlihat jelas. Mekanisme verifikasi yang masih manual, analisis risiko yang minim, dan pemilihan vendor berbasis rekomendasi internal saling memperkuat potensi terjadinya kolusi. Hal ini diperburuk oleh keterlibatan pimpinan yang meskipun signifikan dalam pengambilan keputusan strategis, belum diimbangi dengan monitoring operasional yang konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen formal terhadap integritas, kelemahan pada sistem operasional dapat mengurangi efektivitas pengendalian internal secara keseluruhan. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan seperti digitalisasi proses verifikasi, penerapan tender terbuka, serta audit berbasis risiko bukan hanya bersifat teknis, tetapi merupakan strategi penting untuk memperkuat kepercayaan dan akuntabilitas manajemen proyek.

Penerapan langkah-langkah yang direkomendasikan pada tabel di atas diharapkan mampu mengubah pola pengendalian internal menjadi lebih proaktif, terukur, dan responsif terhadap potensi kecurangan. Integrasi teknologi dalam proses verifikasi akan mempercepat alur persetujuan tanpa mengurangi akuntabilitas, sementara sistem tender terbuka akan meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang konflik kepentingan. Audit berbasis risiko yang dilakukan secara rutin akan membantu organisasi memfokuskan sumber daya pengawasan pada titik-titik yang paling rentan. Implementasi yang konsisten dari perbaikan ini akan memperkuat integritas sistem dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap potensi kerugian akibat fraud.

4. PENGUJIAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengendalian internal yang dijalankan oleh PT. Bangun Mitra Persada menitikberatkan pada keterlibatan langsung pemilik perusahaan dalam seluruh aktivitas pembelanjaan proyek. Pendekatan ini selaras dengan kerangka sistem pengendalian internal yang dirumuskan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), yang mencakup lima elemen utama, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian terhadap risiko, kegiatan pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan [8]. Peran aktif pemilik dalam pengambilan keputusan menunjukkan penguatan pada aspek lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian. Tidak diberikannya kewenangan tanpa mekanisme pengawasan turut meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan proyek. Selain itu, pengambilan keputusan strategis dan operasional yang tetap berada dalam kendali langsung pimpinan perusahaan mencerminkan adanya struktur otorisasi yang kuat, yang merupakan unsur penting dalam menciptakan pengendalian internal yang efektif.

Dari sisi pencegahan fraud, penerapan sistem yang mengacu pada prinsip kehati-hatian dan pengendalian langsung menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan aspek-aspek dari Fraud Triangle Theory. Hal ini sejalan dengan temuan [9] yang menekankan bahwa perusahaan konstruksi menghadapi risiko fraud tinggi karena lemahnya pengawasan dan tingginya kompleksitas proyek. Mereka menyarankan penerapan *fraud risk management* yang berbasis pada penguatan kontrol internal sebagai strategi utama untuk menutup celah-celah kecurangan. Dalam kasus PT. Bangun Mitra Persada, peluang untuk melakukan *fraud* telah diminimalkan melalui kontrol ketat oleh pemilik dan keharusan memperoleh persetujuan sebelum pengeluaran dilakukan. Selain itu, keterbukaan dalam dokumentasi pembelanjaan, penggunaan RAB sebagai dasar acuan anggaran, dan kejelasan kontrak turut memperkecil ruang bagi terjadinya manipulasi atau pembengkakan biaya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mengandalkan kepercayaan personal kepada karyawan, tetapi juga membangun sistem yang mampu meminimalkan celah penyimpangan melalui regulasi dan prosedur formal yang dijalankan secara konsisten.

Praktik pengadaan yang dilakukan oleh karyawan dengan pemahaman harga pasar yang baik, serta hubungan baik dengan vendor, memperkuat efektivitas pengendalian internal dalam menjaga efisiensi dan integritas pembelanjaan proyek. Meskipun bentuknya informal, hubungan ini berkontribusi dalam menekan biaya dan menghindari *overpricing*, sehingga mendukung prinsip efisiensi yang juga menjadi bagian dari tujuan sistem pengendalian internal menurut COSO. Namun demikian, pendekatan semacam ini tetap memerlukan dokumentasi yang akurat dan transparan agar tidak menimbulkan ketergantungan yang berisiko terhadap sumber daya tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa selain sistem formal, budaya kerja dan kepercayaan juga memiliki peran dalam membangun pengawasan internal yang kuat [10]. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sistem pengendalian



internal yang efektif tidak selalu harus kompleks secara struktur, tetapi harus dijalankan dengan komitmen tinggi, transparansi, serta keterlibatan aktif dari manajemen tertinggi dalam pengawasan operasional sehari-hari.

Pengujian lanjutan dilakukan dengan menitikberatkan pada identifikasi titik-titik rawan kecurangan yang paling sering terjadi pada tahap pengadaan dan pengelolaan anggaran proyek. Dalam konteks penelitian ini, area yang dianggap paling kritis mencakup proses penyusunan dan pelaksanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), tahapan persetujuan pembelian, serta pencatatan transaksi keuangan. Setiap tahapan tersebut memiliki potensi tinggi untuk dimanfaatkan sebagai celah terjadinya kecurangan, seperti praktik *mark-up* harga, penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, atau manipulasi bukti pembelian. Identifikasi titik rawan ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan peninjauan langsung dokumen pembelanjaan, sehingga dapat dipetakan bagian-bagian proses bisnis yang membutuhkan pengawasan lebih ketat. Upaya ini sejalan dengan temuan [11], yang menyatakan bahwa kelemahan pada aspek budaya pengendalian dan lemahnya kepatuhan prosedural sering menjadi pemicu terjadinya kecurangan pada proyek yang melibatkan anggaran besar.

Tahapan berikutnya berfokus pada mekanisme verifikasi dan otorisasi pembelanjaan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan telah melalui prosedur persetujuan yang terdokumentasi dengan baik. Dalam sistem yang efektif, setiap pengeluaran harus memperoleh otorisasi berlapis yang melibatkan pimpinan, mulai dari pengajuan pembelian hingga pembayaran kepada vendor. Pengujian ini mengevaluasi kesesuaian dokumen pendukung seperti bukti pembelian, kontrak kerja sama, serta kesesuaian dengan RAB yang telah ditetapkan. Selain itu, dilakukan analisis risiko fraud dalam pengadaan, yang mencakup potensi kolusi dengan vendor, penetapan harga yang tidak wajar, serta penggunaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Hasil temuan ini memperkuat penelitian [12], yang menegaskan bahwa penerapan *whistleblowing system* dan pengendalian internal yang baik mampu mengurangi peluang terjadinya kecurangan pada tahap pengadaan barang dan jasa.

Akhirnya, pengujian juga menyoroti peran aktif pimpinan dalam fungsi pengendalian, yang terbukti menjadi faktor penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran proyek. Keterlibatan langsung pimpinan dalam memberikan persetujuan atas pembelanjaan dinilai efektif dalam mencegah terjadinya transaksi yang tidak sah. Hal ini karena setiap keputusan finansial yang strategis tidak hanya didasarkan pada dokumen, tetapi juga melalui pengawasan langsung di lapangan. Meski demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya kelemahan berupa keterbatasan penggunaan sistem digital untuk dokumentasi serta kurangnya pelaksanaan audit berbasis risiko secara rutin. Kondisi ini sejalan dengan penelitian [13], yang menyatakan bahwa pencegahan fraud yang efektif memerlukan kombinasi pengendalian internal yang kuat, peran aktif pimpinan, dan adanya evaluasi risiko yang dilakukan secara berkesinambungan. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa tanpa adanya audit internal yang terjadwal secara berkala, efektivitas pengendalian internal dapat menurun dari waktu ke waktu [14], [15].

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh PT. Bangun Mitra Persada dalam pelaksanaan Proyek Waingapu telah berjalan secara efektif dalam mencegah terjadinya *fraud*. Mekanisme pengawasan dilakukan secara langsung oleh pemilik perusahaan, dengan setiap proses pembelanjaan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Penggunaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai acuan utama dalam pengeluaran, serta dokumentasi kontrak yang jelas, menjadi landasan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kemampuan karyawan dalam memahami harga pasar dan menjalin hubungan dengan vendor turut berperan dalam menjaga efisiensi dan menghindari pembengkakan biaya. Sistem ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang ketat dan keterlibatan aktif pimpinan perusahaan dapat menutup peluang terjadinya *fraud*, sekaligus membangun budaya kerja yang jujur dan efisien.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal yang sudah berjalan baik, disarankan agar PT. Bangun Mitra Persada mulai membangun sistem dokumentasi digital yang terstruktur agar proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan dapat ditelusuri kembali jika diperlukan. Selain itu, pelatihan rutin bagi karyawan mengenai prinsip-prinsip integritas dan deteksi dini terhadap potensi *fraud* juga perlu ditingkatkan agar pengawasan tidak hanya bergantung pada pimpinan, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif seluruh tim proyek. Penguatan pada aspek evaluasi berkala dan audit internal juga akan menjadi langkah preventif yang mendukung keberlanjutan tata kelola proyek yang bersih dan efisien.

REFERENCES



- [1] H. Humam and L. Ardini, "Efektifitas Sistem Pengendalian Intern dalam Mencegah Kecurangan di Perusahaan Daerah," *Equity*, vol. 23, no. 2, pp. 151–166, 2023.
- [2] S. R. Novitasari and F. S. Akbar, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Karyawan Terhadap Pencegahan Fraud," presented at the Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper, 2021, pp. 282–290.
- [3] P. A. Y. Putri and I. D. M. Endiana, "Pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan (studi kasus pada koperasi di kecamatan payangan)," *KRISNA Kumpul. Ris. Akunt.*, vol. 11, no. 2, pp. 179–189, 2020.
- [4] M. A. Saputra and N. Novita, "Sistem Pengendalian Internal Berdasarkan Coso Framework Pada Perusahaan Konstruksi," *J. Ris. Akunt. Politala*, vol. 6, no. 1, pp. 197–210, 2023.
- [5] F. A. Yahya and L. Venusita, "THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL ON FRAUD PREVENTION BASED ON THE CAUSE FACTORS: Empirical Study on A Construction Company in Surabaya," *J. Account. Entrep. Financ. Technol. JAEF*, vol. 3, no. 2, pp. 133–148, 2022.
- [6] G. C. Manalu and N. Novita, "Apakah Sistem Pengendalian Internal Dapat Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi?," *E-Pros. Akunt.*, vol. 3, no. 1, 2022.
- [7] A. F. Nasution, "Metode penelitian kualitatif," 2023.
- [8] M. Djasuli, I. Triyuwono, L. Purwanti, and R. Roekhudin, "Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) Framework as a Control Framework Construction Internal Sharia Based," *Bp. Int. Res. Crit. Inst.-J. BIRCI-J.*, vol. 5, no. 1, 2022.
- [9] W. N. Apriyanti and K. I. Rais, "Fraud risk management in construction company: A case study in Indonesia," *J. Southeast Asian Res.*, vol. 2020, p. 706737, 2020.
- [10] B. N. F. Zunaedi, H. R. Annisa, and M. Dewi, "Fungsi internal audit dan manajemen risiko perusahaan: sebuah tinjauan literatur," *J. Bisnis Dan Akunt.*, vol. 24, no. 1, pp. 59–70, 2022.
- [11] T. J. W. Prabowo and H. Y. Maulida, "BUDAYA JAWA UNTUK MELANGGENGKAN KORUPSI ANGGARAN?," *J. Akunt. Multiparadigma*, vol. 15, no. 1, pp. 64–81, 2024.
- [12] N. M. Anggraeni, S. Sailawati, and N. E. L. Malini, "Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan," *J. Akunt. Keuang. Dan Bisnis*, vol. 14, no. 1, pp. 85–92, 2021.
- [13] N. Christian and P. Ricardo, "Kajian impact of fraud: nasional dan internasional," *J. Ilm. MEA Manaj. Ekon. Dan Akunt.*, vol. 6, no. 2, pp. 102–117, 2022.
- [14] S. A. Wicaksono and M. Achsin, "Peranan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Terjadinya Tindakan Fraud di Pengadaan (Studi Kasus pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang)," *J. Ilm. Mhs. FEB*, vol. 3, no. 1, 2014.
- [15] L. P. Vinata and A. Zulfiani, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI".